



**BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023**



**BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Biro Umum. LKjIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP sebagai salah satu alat penilai keberhasilan/kegagalan kinerja merupakan wujud transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, LKjIP juga bermanfaat bagi evaluasi internal sebagai umpan balik (feedback) dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian / peminjaman fasilitas kedinasan, seperti penyediaan kendaraan dinas, faslitasi kunjungan tamu, pemakaian ruang pertemuan, pelayanan acara/upacara. Di bidang administrasi keuangan dan asset disediakan pelayanan seperti pelayanan administrasi keuangan setda, penatausahaan asset biro umum dan pelayanan pemeliharaan dan rehabilitasi asset. Di bidang ketatausahaan meliputi pelayanan pelayanan surat masuk, administrasi kepegawaian dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran serta pengadaan sarana dan prasarana.

Demikian LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan.

**Padang, April 2024**  
**Kepala Biro Umum,**



**Ir. Edi Dharma, M.Si.**  
**Pembina Tk. I/ IV.b**  
**NIP. 19680513 199403 1 014**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GRAFIK	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VI
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I    PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	1
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	2
Struktur Organisasi	3
Personil, Sarana dan Prasarana dan Keuangan	5
Aspek Strategis Organisasi	7
Isu-isu Strategis	8
Sistematika laporan Kinerja	11
BAB II    PERENCANAAN KINERJA	12
Rencana Srategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026	12
Perjanian Kinerja 2023	19
Revisi Pohon Kinerja (Cascading) Tahun 2023	22
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA	26
Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	26
Hasil Pengukuran Kinerja	27
Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023	27
– Tujuan 1 (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik)	28
– Tujuan 2 (Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel)	65
– Tujuan 3 (Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79
Realisasi Anggaran	85
BAB IV    PENUTUP	91
LAMPIRAN	IX

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1	Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Pendidikan	5
Tabel 1.4.2	Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian	5
Tabel 1.4.3	Jumlah SDM (PNS) Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.4.4	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pada Biro Umum	6
Tabel 2.1.1.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026	15
Tabel 2.1.2.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	16
Tabel 2.1.2.2	Keterkaitan Antara Misi, Tujuan Dan Sasaran Kepala Daerah Pada Rpjmd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dengan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	17
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 2.2.2	Program/Kegiatan Dan Anggaran Perjanjian Kinerja Biro Umum Ta 2022	21
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2.1	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023	27
Tabel 3.3.1.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023	28
Tabel 3.3.1.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1	29
Tabel 3.3.1.3	Nilai Komponen Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	33
Tabel 3.3.1.4	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2023 Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	34
Tabel 3.3.1.5	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah	41

## DAFTAR TABEL

	Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	
Tabel 3.3.1.6	Capaian Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh	44
Tabel 3.3.1.7	Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 Per Komponen	46
Tabel 3.3.1.8	Target Dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	47
Tabel 3.3.1.9	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Standar Provinsi Lain	48
Tabel 3.3.1.10	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh	54
Tabel 3.3.1.11	Capaian Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh	55
Tabel 3.3.1.12	Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 Per Komponen	57
Tabel 3.3.1.13	Target Dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	58
Tabel 3.3.1.14	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Standar Provinsi Lain	59
Tabel 3.3.1.15	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Indikator Kinerja Ikm Pelayanan Pimpinan	64
Tabel 3.3.2.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023	66
Tabel 3.3.2.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1	67
Tabel 3.3.2.3	Nilai Komponen Tingkat Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Tahun 2021 - 2023	68
Tabel 3.3.2.4	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat	69

## DAFTAR TABEL

Daerah Tahun 2023 Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026		
Tabel 3.3.2.5	Matrik Tindak Lanjut Perencanaan Kinerja	74
Tabel 3.3.2.6	Matrik Tindak Lanjut Pengukuran Kinerja	74
Tabel 3.3.2.7	Matrik Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja	75
Tabel 3.3.2.8	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	76
Tabel 3.3.2.9	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel	79
Tabel 3.3.3.1	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023	81
Tabel 3.3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1	81
Tabel 3.3.3.3	Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran % Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2023 Dengan Target Rpjmd / Renstra Tahun 2021 – 2026	83
Tabel 3.3.3.4	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	86
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	88

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Biro Umum Setda Prov. Sumbar	4
Grafik 2	Pohon Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	23
Grafik 3	Capaian Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan Dan Tamu Pemerintah Daerah Serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Per Indikator Tahun 2023	31
Grafik 4	Realisasi Sasaran Strategis 1.1 Biro Umum Selama Tahun 2021 S.D Tahun 2023	32
Grafik 5	Perbandingan Realisasi Dengan Standar Provinsi Lain	35
Grafik 6	Capaian Ikm Pelayanan Tamu Kdh/Wkdh Per Komponen Penilaian	45
Grafik 7	Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	45
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Tamu Rumah Tangga Kdh/Wkdh Dengan Standar Provinsi Lain	48
Grafik 9	Capaian Ikm Pelayanan Pimpinan Per Komponen Penilaian	55
Grafik 10	Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023	55
Grafik 11	Perbandingan Realisasi Ikm Pelayanan Pimpinan Dengan Standar Provinsi Lain	58
Grafik 12	Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Per Komponen Tahun 2023	66
Grafik 13	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Selama Tahun 2021 S.D Tahun 2023	67
Grafik 14	Perbandingan Realisasi Dengan Standar Provinsi Lain	69

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 15	Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Selama Tahun 2021 S.D Tahun 2023	81
Grafik 16	Perkembangan Realisasi Belanja Dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2023	86
Grafik 17	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dan Tahun 2022	88

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Biro Umum Tahun 2021-2026, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya mewujudkan tujuan strategis yang direncanakan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" dan Tujuan generik "Meningkatnya Kinerja Organisasi". Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Biro Umum merumuskan sasaran strategis pertama, Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan, sasaran kedua Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan sasaran strategis ketiga Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi. Dengan sasaran tersebut, Biro Umum fokus kepada 3 (tiga) strategi antara lain: meningkatkan kinerja pelayanan tamu, pimpinan dan administrasi keuangan setda, mengoptimalkan kinerja pelayanan internal, pengelolaan perencanaan dan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.

Sesuai dengan tugas pokoknya, Biro Umum berperan sebagai unit pendukung (supporting unit) peningkatan kinerja dan kelancaran kegiatan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Peran tersebut diantaranya diselenggarakan melalui pelayanan dibidang kerumahtanggaan, seperti pelayanan pemakaian/peminjaman fasilitas kedinasan, seperti penyediaan kendaraan dinas, faslitasi kunjungan tamu, pemakaian ruang pertemuan. Di bidang ketatausahaan disediakan pelayanan kesekretariatan seperti pelayanan surat masuk, administrasi kepegawaian dan pengelolaan perencanaan dan penganggaran, serta pelayanan sarana dan prasarana setda seperti pengadaan sarpras.. Di bidang keuangan setda merupakan pelayanan sarana dan prasarana setda seperti pemeliharaan sarpras dan pengelolaan administrasi asset SKPD, pelayanan keuangan Sekretariat Daerah seperti layanan penerbitan SPM dan verifikasi SPj.

Pada Tahun 2023, sebagaimana yang akan dijelaskan pada Bab II Perencanaan Kinerja, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Biro Umum.

Guna menyempurnakan SAKIP dilakukanlah revisi terhadap Pohon Kinerja (Cascading) Biro Umum untuk menyelaraskan dan mempertajam hubungan keterkaitan Tujuan, Sasaran dan indikatornya masing-masing.

Adapun pencapaian Sasaran Strategis Biro Umum Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1: Meningkatnya Kepuasan Stakeholders Dibidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pimpinan dan Administrasi Keuangan Setda.

- Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 91,52 (sangat baik), persentase capaian 103,18% “Sangat Baik”.
  - Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Pimpinan. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 90,14 (sangat baik), persentase capaian 101,62% “Sangat Baik”
  - Indikator Kinerja : IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Target Sangat Baik, realisasi mencapai 89,75 (sangat baik), persentase capaian 101,18% “Sangat Baik”
2. Sasaran strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi .
- Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Target ditetapkan BB (70,85), realisasi BB (73,19), persentase capaian 103,30% “Sangat Baik
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi
- Indikator Kinerja : % realisasi penerimaan retribusi. Target ditetapkan 95%, realisasi 70,00%, persentase capaian 73,68% “Cukup”.

Dengan demikian, pencapaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis Biro Umum Tahun 2023 sebesar 96,59% dengan predikat kinerja “Sangat Baik”.

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Esselon II
- Lampiran 2 Formulir Pengukuran Kinerja

# BAB I

## Pendahuluan

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

LKj Biro Umum Tahun 2023 ini disusun dengan maksud memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro Umum, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian Biro Umum selama satu periode. Selain itu, juga sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Biro Umum untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Umum berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tugas pokok Biro Umum berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah “membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Umum melaksanakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha
2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha; dan
3. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

## **1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas**

### **1. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### **2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset**

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

### 3. Bagian Rumah Tangga

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

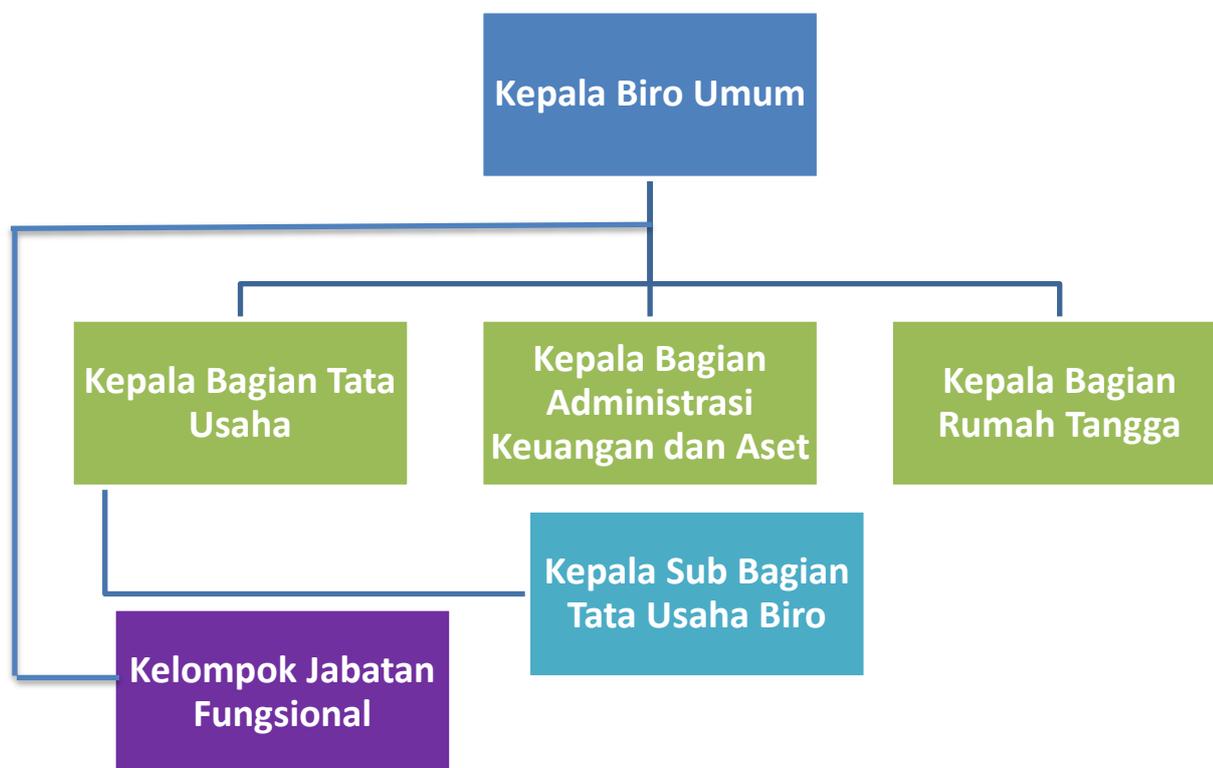
- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

#### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka susunan struktur organisasi Biro Umum yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum terdiri dari 3 Bagian yang masing – masingnya dipimpin oleh Kepala Bagian, 1 Sub Bagian yang dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**GRAFIK 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIRO UMUM SETDA PROV. SUMBAR**



#### 1.4. Personil, Sarana dan Prasarana, Keuangan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Biro Umum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 232 dengan rincian 69 orang ASN, 4 orang PTT dan 159 orang non ASN orang seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Sebagai supporting unit tentu diperlukan SDM yang berkompentensi dan memiliki skil tertentu dalam menjalankan tugas-tugas Biro Umum. Biro Umum saat ini memiliki persentase pegawai ASN dengan jenjang pendidikan D3 ke atas sebesar 50,72 persen (35 orang) dari total pegawai Biro Umum. Komposisi pegawai Biro Umum dapat disajikan pada tabel-tabel berikut :

**TABEL 1.4.1**  
**JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	11 Orang
3	S1	21 Orang
4	D3	3 Orang
5	SMA	31 Orang
6	SMP	2 Orang
7	SD	1 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum 2023

**TABEL 1.4.2**  
**JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS KEPEGAWAIAN**

No.	Jenis	Jumlah
1	PNS	69 Orang
2	CPNS	-
3	PTT	4 Orang
4	Tenaga Kontrak	159 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2023

**TABEL 1.4.3**  
**JUMLAH SDM (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN**

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	8 Orang
2	III	39 Orang
3	II	21 Orang
4	I	1 Orang

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Biro Umum Tahun 2023

#### SARANA DAN PRASARANA

Secara umum kondisi eksisting sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

**TABEL 1.4.4**  
**JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PADA BIRO UMUM**

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi
1	Alat-alat Besar	51	Baik
2	Alat-alat Angkutan	128	115 Unit Baik dan 13 Unit Rusak Berat
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	16	Baik
4	Alat Pertanian	20	Baik
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.621	Baik
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	297	Baik
7	Alat-alat Kedokteran	18	Baik
8	Alat Laboratorium	26	15 Unit Baik dan 11 Unit Rusak Ringan
9	Bangunan Gedung	28	25 Unit Baik dan 3 Unit Rusak Ringan
10	Monumen	1	Baik

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi
11	Buku Perpustakaan	353	141 Baik 212 Rusak Berat
12	Barang Bercorak Kebudayaan	60	Baik

Sumber : Buku Inventaris Biro Umum Tahun 2023

## KEUANGAN

Anggaran untuk menunjang program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2023 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2023 ini berjumlah Rp.124.810.215.598 setelah perubahan. Dengan Total Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, KDH/WKDH dan Belanja Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.56.887.188.611 dan Belanja Penunjang Urusan Lainnya sebesar Rp.67.923.026.987.

### 1.5. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset dan Tata Usaha dalam rangka menjamin terciptanya pelayanan yang baik bagi KDH/WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli serta pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Dalam hal ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Potensi Strategis antara lain :

1. Menguatkan peran Biro Umum dalam hal pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli dengan memastikan : 1) SDM Aparatur yang melayani memiliki kemampuan optimal ; 2) Sarana dan prasaran penunjang pelayanan harus terus diperbaharui dengan pengadaan atau pemeliharaan ; 3) rentang waktu pelaksanaan pelayanan dapat dipercepat dan tetap optimal.

2. Dalam hal pelayanan administrasi keuangan Setda, Biro Umum juga harus memastikan : 1) SDM Aparatur yang mampu mengoperasikan sistem informasi dan memahami peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan keuangan ; 2) pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
3. Dalam pelayanan internal, Biro Umum melaksanakan di Bidang Ketatausahaan yaitu meliputi fasilitasi perencanaan, kepegawaian, surat menyurat dan pengadaan barang dan jasa.

### 1.6. Isu-Isu Strategis

Mencermati permasalahan dan telaahan terhadap tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan beberapa isu strategis yang terkait, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik menjadi fokus perhatian pemerintah daerah saat ini karena besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dalam hal ini, Biro Umum memiliki peran yang strategis dalam memberikan atau memfasilitasi kegiatan Pimpinan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sejalan dengan misi Gubernur Sumatera Barat pada periode RPJMD ke-IV (2021-2026) Biro Umum salah satu OPD yang mengampu pada Misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani pada sasaran ke tiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan public, maka Biro Umum memiliki peran strategis sebagai yang terdepan dalam:
  - a. Terdepan dalam memberikan pelayanan kepada tamu Pimpinan, pelayanan kepada pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda. Untuk itu perlu menyikapinya dengan melakukan penguatan kapasitas SDM Biro Umum, sarana dan prasarana.
  - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum BB (70)
  - c. Salah satu OPD yang memiliki target pendapatan dalam bidang penerimaan retribusi daerah pemakaian kekayaan daerah.

## TANTANGAN DAN PELUANG

Tantangan dan peluang merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi organisasi dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Biro Umum sebagai unit pendukung pelayanan pimpinan dan kesekretariatan kedepannya akan menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memberikan dukungan terhadap kesuksesan tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana intensitas kunjungan kerja Pimpinan semakin tinggi dan intensitas kunjungan tamu yang juga semakin tinggi dan sulit diprediksi, perubahan regulasi di bidang tata Kelola keuangan dan tuntutan agar selalu berinovasi terutama dalam hal peningkatan pendapatan retribusi daerah. Semakin tingginya intensitas pekerjaan yang dihadapi akan tetapi struktur organisasi justru mengecil, seolah menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, tantangan juga akan datang dari aspek pelayanan publik yang semakin menuntut standar pelayanan prima. Sehingga faktor kualitas SDM, Sarana dan Prasarana menjadi dua aspek yang harus diperhatikan.

Berperan sebagai supporting unit Pelayanan Tamu, Pelayanan Pimpinan, Pelayanan Administrasi Keuangan Setda, Peningkatan Pendapatan Daerah Biro Umum turut mengembangkan inovasi di bidang pelayanan publik, diantaranya adalah peminjaman fasilitas gedung, ruang rapat, kendaraan dinas dan ruang teleconference yang dapat diajukan permohonannya secara online. Pengembangan pelayanan fasilitas ini dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PAD). Selain itu, inovasi pada penomoran SPT dan SPPD lingkup setda melalui <http://sispensu.biroumum.sumbarprov.go.id/>, dan kedepannya Biro Umum akan mengembangkan sistem yang bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik yang berorientasi pada pengelolaan kinerja ASN dan pencatatan arsip secara digital.

Peluang pengembangan pelayanan Pimpinan oleh Biro Umum dapat berupa: pertama, revitalisasi fasilitas ruang rapat dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pimpinan dalam melaksanakan

pertemuan dengan Perangkat Daerah dan instansi lainnya di daerah, yang menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi setiap bulannya.

Hambatan yang dihadapi oleh Biro Umum dalam pengembangan pelayanan ini datang dari aspek SDM yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat penerapan budaya kerja seperti belum terlihatnya pelayanan yang ramah dari aparaturnya serta belum maksimalnya rancangan dan implementasi prosedur pelayanan tamu pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda. Selain itu hambatan datang dari sarana prasarana yang ada dirasa masih kurang sehingga kualitas pelayanan dianggap masih kurang.

Dari uraian di atas, maka peta strategi dan scope kebijakan Biro Umum kedepannya dapat difokuskan kepada Pertama, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda; Kedua, Terwujudnya Tata Kelola Organisasi; dan Ketiga Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Sedangkan kebijakan-kebijakan administrasi umum lainnya merupakan upaya Biro Umum sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan rekomendasi dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana melalui pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan Biro Umum, utamanya fasilitas pada beberapa gedung / aset yang dikelola serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan Pimpinan.
2. Meningkatkan daya dukung personil melalui rekrutmen tenaga khusus yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan Biro Umum.
3. Meningkatkan dukungan teknologi pada pelayanan Biro Umum sispensu, sipintas, dan lain-lain.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Biro Umum pada 5 (lima) layanan unggulan Biro Umum, yaitu Pelayanan Ruang Pertemuan, Pelayanan Tamu / Pimpinan, Pelayanan Peminjaman Kendaraan dan Fasilitas Kedinasan, Pelayanan

Penerimaan dan Pendistribusian Surat, dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda.

### 1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I**      Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II**     Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Revisi Pohon Kinerja Tahun 2023

**Bab III**    Akuntabilitas Kinerja

- Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- Hasil Pengukuran Kinerja
- Capaian Kinerja SKPD
- Realisasi Anggaran

**Bab IV**    Penutup

Lampiran

## **BAB II**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **2.1 Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026**

Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation and sense of belonging* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam bentuk 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

Dalam misi RPJMD tersebut Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam Misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas. Misi 7 ini memiliki 1 tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. **Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.**
2. Meningkatkan kapabilitas birokrasi.
3. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.**

Dari 3 (tiga) sasaran tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berada pada sasaran 1 yaitu Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

#### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Melalui sasaran 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dengan indicator nilai akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya pendapatan asli daerah kewenangan perangkat daerah dengan indicator persentase realisasi PAD

Melalui sasaran 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indicator tujuan IKM Pelayanan Publik Biro Umum

Melalui tujuan ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menghasilkan pelayanan yang terbaik dan komprehensif kepada Tamu KDH/WKDH, pelayanan pimpinan dan pelayanan administrasi keuangan setda.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan secretariat daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi
3. Meningkatnya pencapaian target retribusi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.1.1.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO UMUM SEKRETARIAT**  
**DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		IKM Pelayanan Publik Biro Umum	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpin dan Tamu	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
		Pemerintah Daerah serta Pelayan	IKM Pelayanan Pimpin	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
		Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan setda	88,31	88,50	88,70	88,90	90,20	90,40
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel		Nilai Akuntabilitas Kinerja	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi		Persentase Realisasi PAD	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber : Renstra Biro Umum tahun 2021 - 2026

### 2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka

menengah Biro Umum Sekretariat Daerah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 2.1.2.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH BIRO UMUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung	Meningkatkan kecukupan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
				Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik
				Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok atau kegiatan
			Meningkatkan kinerja pelayanan pimpinan dan tamu rumah tangga KDH/WKDH	Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan pimpinan dan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
		Mengoptimalkan kinerja pengelolaan gedung/rumah	Penanganan keluhan pengguna gedung/rumah jabatan yang cepat dan handal	
		Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur di bidang penatausahaan keuangan	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek	
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
			Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan Pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	Meningkatkan kualitas SDM yang melayani	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek
			Meningkatkan promosi target retribusi Biro Umum	Mengoptimalkan promosi melalui media social
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang	Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa

Sumber : Renstra Biro Umum tahun 2021 - 2026

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut :

**TABEL 2.1.2.2**

**Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

<b>MISI KE – 7 RPJMD 2021 – 2026 :</b>				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
<b>TUJUAN RPJMD 2021 – 2026 :</b>				
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani				
<b>SASARAN RPJMD 2021 – 2026 :</b>				
Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel				
Tujuan dan Sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah :				
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>

Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM organisasi
			Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
			Meningkatkan Pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	Meningkatkan kualitas SDM yang melayani	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek
			Meningkatkan promosi target retribusi Biro Umum	Mengoptimalkan promosi melalui media social
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang	Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa

**SASARAN RPJMD 2021 – 2026**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan Sasaran Biro Umum Sekretariat Daerah :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Revitalisasi Sarana dan Prasarana guna meningkatkan daya dukung	Meningkatkan kecukupan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
				Menjaga kualitas kondisi sarana dan prasarana yang baik
				Penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok atau kegiatan
		IKM Pelayanan Pimpinan	Meningkatkan kinerja pelayanan pimpinan dan tamu rumah tangga KDH/WKDH	Meningkatkan kemampuan SDM pelayanan pimpinan dan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH
			Mengoptimalkan kinerja pengelolaan gedung/rumah	Penanganan keluhan pengguna gedung/rumah jabatan yang cepat dan handal

		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan setda	Meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis aparatur di bidang penatausahaan keuangan	Peningkatan kemampuan SDM melalui keikutsertaan Pelatihan / bimtek
--	--	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja diatur menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam merencanakan perjanjian kinerja, agar terukur dan dapat pula mencapai tujuan organisasi, maka indikator yang dijadikan instrumen untuk mengukur kinerja, dijabarkan dari Sasaran Strategis yang telah sesuai (sinkron) dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Biro Umum.

Pada Tahun 2023, Biro Umum memiliki 5 (Lima) indikator kinerja dima 3 (tiga) diantaranya ditetapkan menjadi IKU. Indikator tersebut merupakan alat ukur tercapainya 3 (Tiga) Sasaran Strategis Biro Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Umum 2021-2026.

Agar perencanaan kinerja organisasi semakin baik perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun perjanjian kinerja pejabat secara hierarkis atau leveling, mulai dari Kepala SKPD pada level Eselon II, Kepala Bagian pada level Eselon

III, dan Kepala Sub Bagian pada level Eselon IV, Kelompok Jabatan Fungsional serta masing-masing Staf Pelaksana pada level terendah. Penyusunan struktur kinerja bertingkat ini mestilah selaras dan tersambung antar level dan indikator yang ditetapkan juga mesti memenuhi kriteria SMART.

Selanjutnya penyusunan indikator kinerja pada masing-masing level juga memperhatikan ketersediaan basis data, mekanisme pengumpulan data dan pengolahan data yang tervalidasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan penilaian kinerja dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan target indikator kinerja, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja. Namun pada penilaian LKj secara keseluruhan, perencanaan kinerja yang sesuai kriteria menjadi porsi penilaian yang cukup besar. Oleh karenanya penting sekali untuk menyusun perencanaan kinerja yang memenuhi kriteria SMART.

**TABEL 2.2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,70 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Pimpinan	88,70 (Sangat Baik)
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,70 (Sangat Baik)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	70,85 (BB)
Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Total anggaran Perjanjian Kinerja 2023 ini berasal dari anggaran Belanja Biro Umum TA. 2023 sebesar Rp.124.810.215.598

Dengan demikian, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang digunakan pada pengukuran Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 berikut ini :

TABEL 2.2.2

## PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TA 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul>	122.785.515.384
	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</li> </ul>	
	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</li> <li>• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ul>	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	BB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	2.024.699.314
Meningkatnya pencapaian	% realisasi penerimaan retribusi	95%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</li> </ul>	0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Target Retribusi				
JUMLAH				<b>124.810.215.598</b>

Sumber : DPA Perubahan Biro Umum Tahun 2023

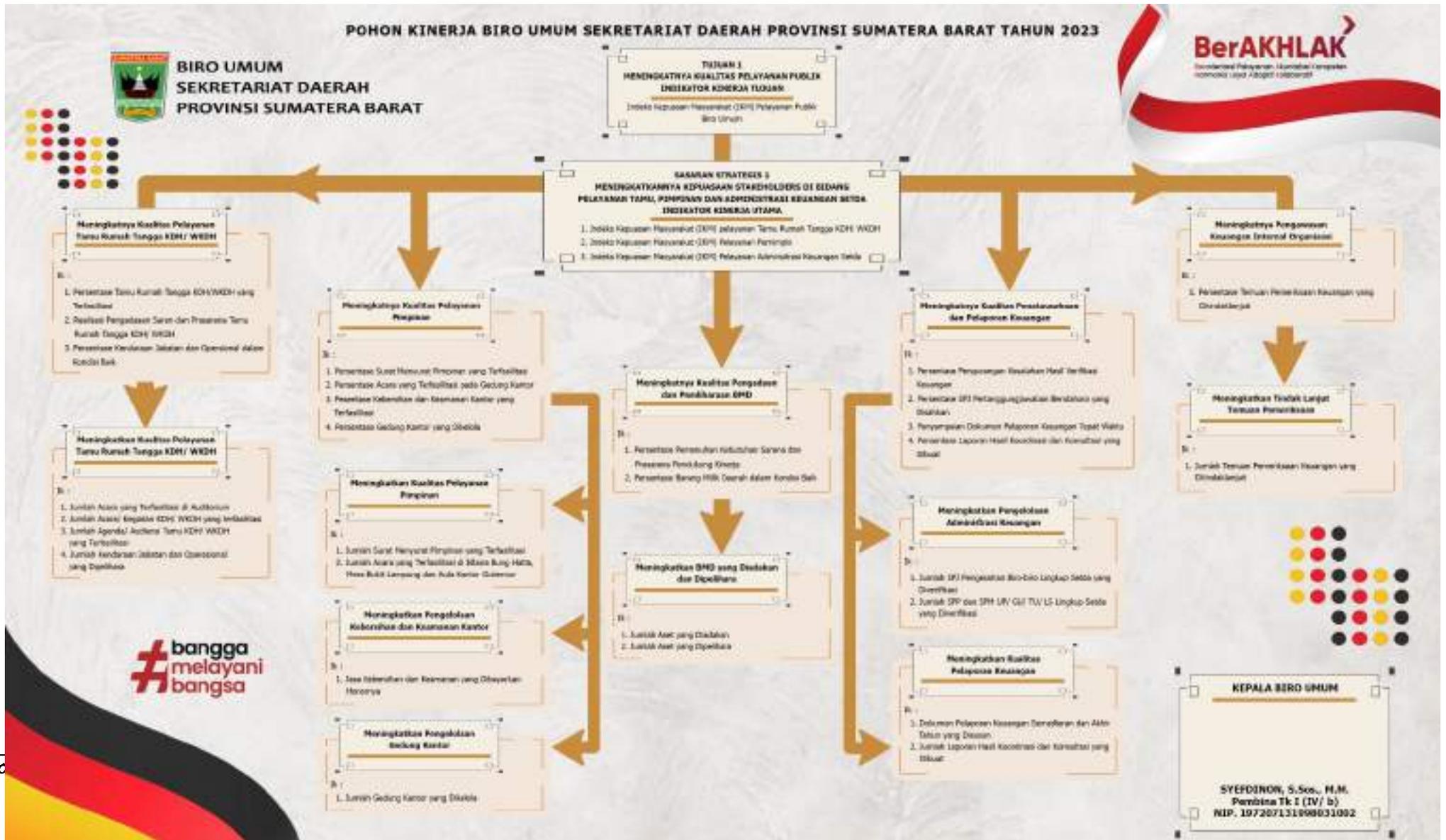
### 2.3 Revisi Pohon Kinerja (Cascading) Tahun 2023

Sehubungan dengan penyempurnaan SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui asistensi dengan Tim Pakar dari Kementerian PAN dan RB, telah dilakukan evaluasi terhadap pohon kinerja (cascading) Perangkat Daerah. Evaluasi ini menghasilkan perbaikan pada struktur pohon kinerja Biro Umum Tahun 2023 ini, yakni menyelaraskan sasaran strategis biro umum dengan sasaran eselon III dan eselon IV.

Pada Pohon Kinerja Biro Umum terdapat 3 (tiga) Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah” dengan 5 (lima) Sasaran Strategis

Pohon Kinerja (Cascading) Biro Umum pada Tahun 2023 setelah direvisi dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini :

GRAFIK 2



# LAPORAN KINERJA 2023

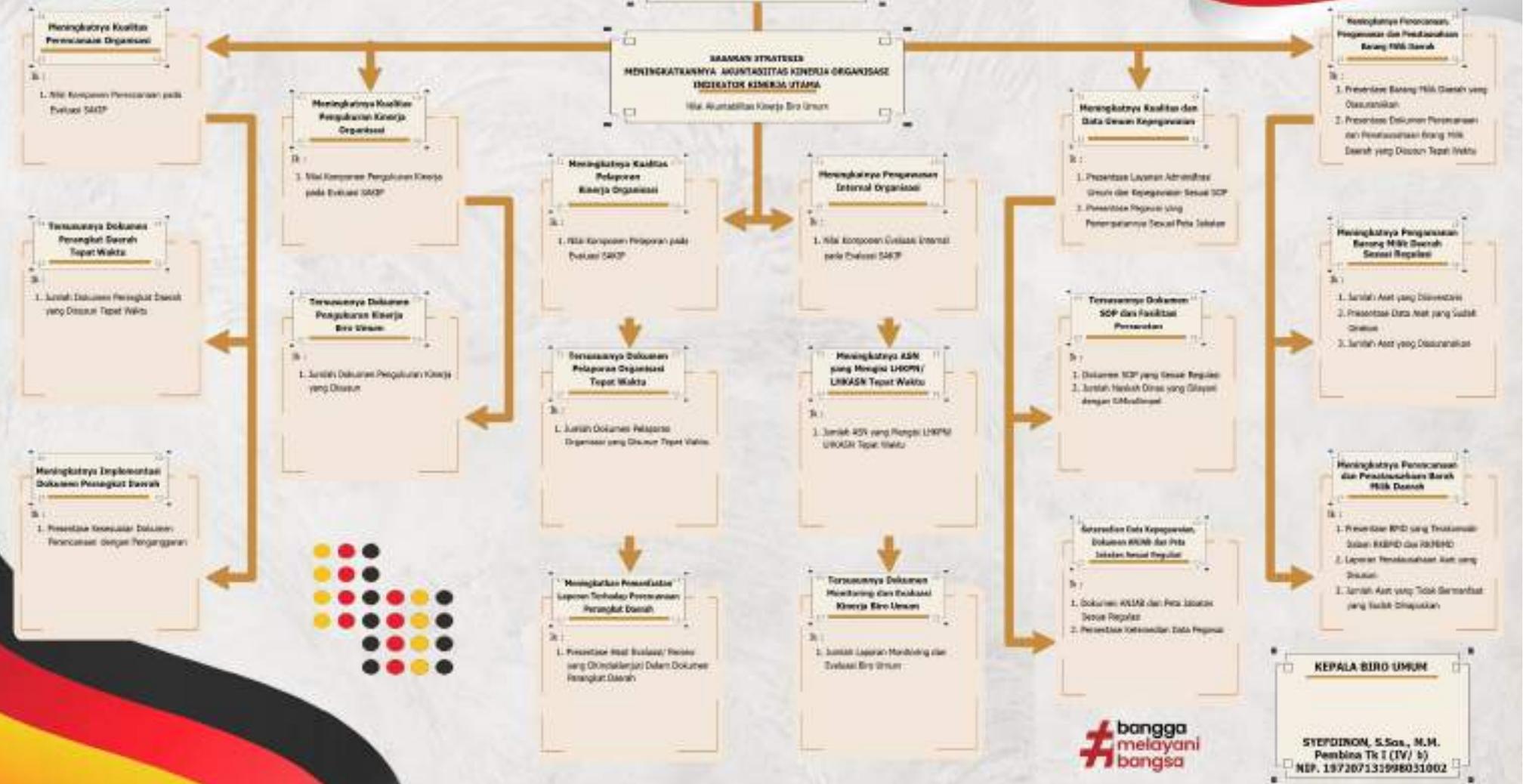
## POHON KINERJA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023



**BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TUJUAN 1  
MENINGKATKAN ORGANISASI YANG AKUNTABEL  
INDIKATOR KINERJA TUJUAN**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja

**SAKSIAN STRATEGIS  
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI  
INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum



**KEPALA BIRO UMUM**  
  
STEFIDINON, S.Sos., M.M.  
Pembina Tk I (IV) / b  
NIP. 197207131998031002



BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

POHON KINERJA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023



**TUJUAN 3**  
**MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**  
**INDIKATOR KINERJA TUJUAN**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja

**SASARAN STRATEGIS**  
**MENINGKATKANNYA PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum

**Meningkatnya Realisasi Retribusi**  
LK :  
1. Nilai Realisasi Retribusi

**Meningkatnya Optimalisasi  
Penerimaan Retribusi**  
LK :  
1. Jumlah STS Retribusi Daerah yang  
Dilaporkan Tepat Waktu

**KEPALA BIRO UMUM**  
  
SYEFDINON, S.Sos., M.M.  
Pembina Tk I (IV/ b)  
NIP. 197207131998031002



## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 55%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berikut disajikan rekapitulasi hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023.

**TABEL 3.2.1**  
**REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN**  
**PERJANJIAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA
			KINERJA		CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, Pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (91,52)	103,18	Sangat Tinggi
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (90,14)	101,62	Sangat Tinggi
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (89,75)	101,18	Sangat Tinggi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,85)	BB (73,19)	103,30	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya pencapaian Target Retribusi	% realisasi penerimaan retribusi	95%	70,00%	73,68	Sedang
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan</b>					<b>96,59</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Dari Tabel 3.2.1 di atas, dapat dilihat capaian kinerja rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis Biro Umum Tahun 2023 adalah sebesar 96,59%. Dengan demikian hasil capaian kinerja lebih besar dari target yang ditetapkan termasuk klasifikasi berhasil dengan predikat **Sangat Tinggi**.

### 3.3 Capaian Kinerja Biro Umum Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Umum Tahun 2023 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini akan disajikan

evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis

### 3.3.1 Tujuan 1 :”*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*”.

Tujuan pertama Renstra Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui satu indicator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Biro Umum. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indicator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1.1**

**Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
				Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	88,70	90,47	101,99	90,40	100,08

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indicator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama telah dicapai dengan sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 101,99%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 100,08%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis 1.1</b>	<b>Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah</b>
------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.** Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah dilakukan

melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1) IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH ; 2) IKM Pelayanan Pimpinan, dan ; 3) IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda. Berdasarkan hasil pengolahan data questioner terhadap indikator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 90,47 dari target 88,70 atau dengan capaian 101,99%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

**TABEL 3.3.1.2**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1.1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (91,52)	103,18	Sangat Tinggi
2.	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (90,14)	101,62	Sangat Tinggi
3.	IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (89,75)	101,18	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (90,47)	101,99	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pelaksanaan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1) Tahap Perencanaan (desain survei)

Survei bertujuan untuk mendapatkan jawaban (variabel deskriptif) dari pertanyaan: “*seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan tamu Rumah Tangga KDH/WKDH? ; seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan pimpinan, dan ; seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan administrasi keuangan setda*”.

Ada 9 unsur survei yang dijadikan pertanyaan survei yaitu :

- a) Persyaratan
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- c) Waktu Pelayanan
  - d) Biaya / Tarif
  - e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
  - f) Kompetensi Pelaksana
  - g) Perilaku Pelaksana
  - h) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
  - i) Sarana dan Prasarana
- 2) Tahap Persiapan
- Hal-hal yang perlu disiapkan diantaranya adalah
- a) Organisasi survei : Tim survei adalah tim survei internal Biro Umum
  - b) Jadwal survei : Survei dilaksanakan pada Bulan Maret s/d Desember 2023
  - c) Materi survei : Alat pengumpul data telah dipersiapkan berupa kuesioner
- 3) Pelaksanaan Lapangan
- Pelaksanaan survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna layanan (sampel) di Rumah Jabatan KDH/WKDH, Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Mess Bukit Lampu.
- 4) Pengolahan Data
- Setelah proses pengumpulan data melalui angket/kuesioner, maka data kuantitatif perlu diolah dengan statistic deskriptif. Data dikelompokkan dan ditabulasikan agar dapat disajikan melalui tabel, grafik atau diagram.
- 5) Penyajian dan Analisis
- Analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabulasi dan grafik. Data yang telah diolah ke dalam tabulasi dijumlahkan dan selanjutnya dihitung menggunakan rumus sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Formula yang digunakan :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 1.11$$

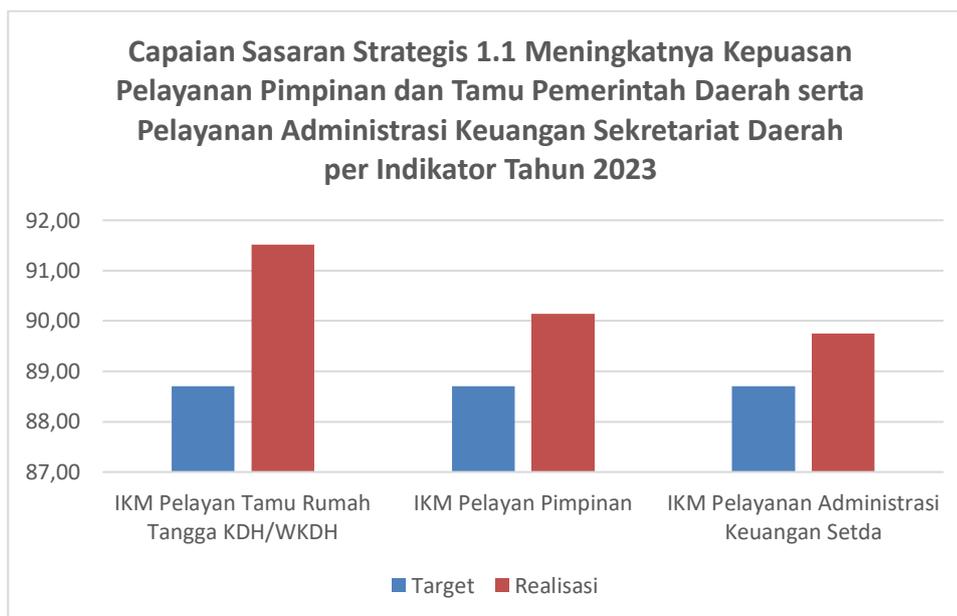
$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

*SKM Unit Pelayanan × 25*

Biro Umum memperoleh nilai IKM tertinggi 91,52 dari target 88,70 dan nilai IKM terendah 89,75 dari target 88,70. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan public biro umum tahun 2023 :

**Grafik 3**

**Capaian Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah per Indikator Tahun 2023**



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.** Dibanding dengan capaian sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 89,19 menjadi 90,47 atau meningkat 0,95 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

#### Grafik 4

#### Realisasi Sasaran Strategis 1.1 Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023



**Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023**

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti persyaratan dari nilai 94,21 tahun 2022 menjadi 90,16 tahun 2023 atau turun sebesar 4,04 point, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanandari nilai 90,11 tahun 2022 menjadi 89,51 atau turun sebesar 0,56 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan pimpinan dan tamu pemerintah daerah serta pelayanan administrasi keuangan sekretariat daerah tahun 2021 – 2023

Tabel 3.3.1.3

**Nilai Komponen Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
1.	Persyaratan	94,17	94,21	90,16
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	87,11	87,40	89,73
3.	Waktu Penyelesaian	85,64	85,38	89,37
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	98,44
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	89,78	90,11	89,51
6.	Kompetensi Pelaksana	92,85	92,05	89,34
7.	Perilaku Pelaksana	91,10	90,90	89,59
8.	Sarana Dan Prasarana	67,96	72,60	87,29
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	90,98	91,08	90,81
<b>Nilai Pengolahan Data Quesioner</b>		88,73	89,19	90,47
<b>Kategori</b>		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.4

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,70	91,52	103,18	90,40	101,24
		IKM Pelayanan Pimpinan	88,70	90,14	101,62	90,40	99,71
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	88,70	89,75	101,18	90,40	99,28
<b>Nilai Rata-rata</b>			88,70	90,47	101,99	90,40	100,08

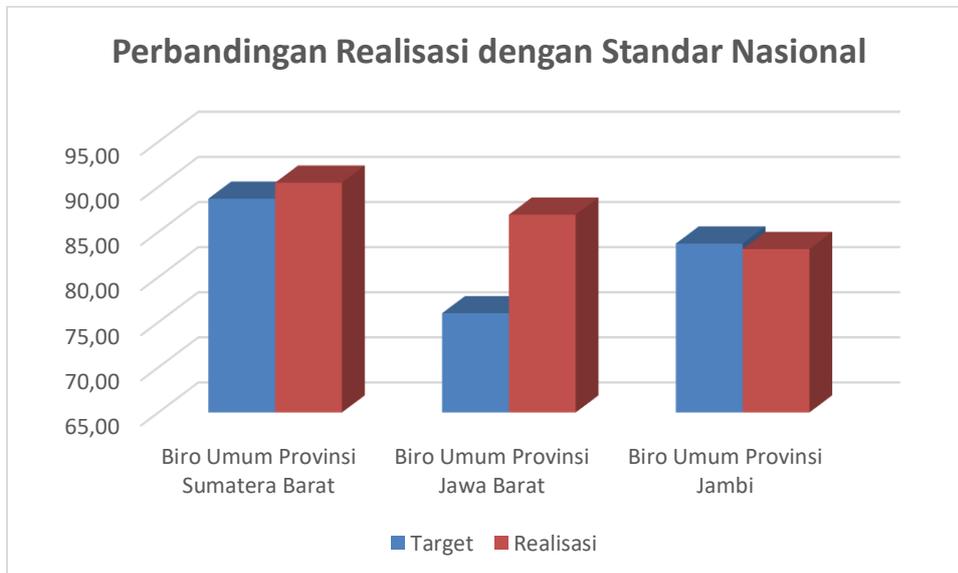
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 101,99. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah telah tercapai sebesar 100,08. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas pelayanan dan terus ditingkatkan agar nanti tidak turun capaiannya di tahun berikutnya.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas kedua provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Jawa

Barathanya mencapai 86,92 dan Provinsi Jambi mencapai 83,11, sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut :

**Grafik 5**  
**Perbandingan Realisasi dengan Standar Provinsi Lain**



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Dalam upaya pencapaian indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, diantaranya :

- 1) **Persyaratan** : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,16 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 "Sangat Baik". Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah karena persyaratan yang diminta biro umum relative mudah dan tertuang dalam SOP Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH.
- 2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur** : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu

rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,73 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.

- 3) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian cepat dan tidak berbelit karena sesuai dengan SOP yang ada, hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”
- 4) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 98,44 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis dan walaupun ada biaya biasanya digunakan untuk peminjaman fasilitas yang sesuai aturannya dikenakan tarif retribusi.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,51 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah produk dan spesifikasinya jelas tertera dalam SOP pelayanan biro umum, baik itu yang gratis maupun yang membutuhkan biaya retribusi.
- 6) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana sangat mumpuni hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,34 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya briefing yang dilakukan oleh pimpinan ditambah adanya bimtek untuk peningkatan kompetensi pelaksana di bidang pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH.
- 7) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana sangat mumpuni hal ini dapat dilihat

bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,59 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya briefing yang dilakukan oleh pimpinan ditambah adanya bimtek untuk peningkatan kompetensi pelaksana di bidang pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH

- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,81 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya pelaksana yang selalu stand by dalam menampung saran dan masukan dari stakeholders.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah juga terdapat beberapa **factor yang penghambat** tercapainya sasaran kerjanya, diantaranya :

- 1) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 87,29 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Salah satu sarana dan prasarana yang masih menjadi titik lemah adalah fasilitas internet terutama pada unit pelayanan Biro Umum di Istana Bung Hatta Bukittinggi

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di Tahun 2024**, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

- 1) Melakukan recruitment tenaga kontrak pramusaji yang akan menjadi pelayanan tamu KDH/WKDH

- 2) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan tamu KDH/WKDH dalam Bimtek terkait.
- 3) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 80 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 25 orang atau 31,25% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan</li> <li>• Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan masih sedikit memiliki permasalahan terutama fasilitas internet yang cepat.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah terealisasi pada tahun 2023 sebesar 90,47% dari 88,70% dengan tingkat capaian sebesar 101,99% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.122.785.516.284 dan telah terealisasi sebesar Rp.120.965.553.796 atau sebesar 98,52%. Anggaran ini tersebar pada 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ; 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ; dan 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 6 sub kegiatan yaitu 1) Fasilitasi Kunjungan Tamu ; 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ; dan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ; 2) Pengadaan Mebel ; dan 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; dan 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 6 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ; 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ; 3) Pemeliharaan Mebel ; 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ; 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya ; dan 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- g. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ; 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.122.785.516.284

CK : Capaian Kinerja (%) = 101,99%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.120.965.553.796

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. } 122.785.516.284 \times 101,99\%) - 120.965.553.796}{(\text{Rp. } 122.785.516.284 \times 101,99\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{125.228.948.058 - 120.965.553.796}{125.228.948.058} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 3,40\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 3,40% untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah :

- a) Dalam pengumpulan data questioner, terutama untuk unit pelayanan tamu di Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu questioner dikirim softcopynya ke unit kerja tersebut, dan pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
- b) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.
- c) Sarana dan prasarana untuk jaringan internet pada Istana Bung Hatta mulai tahun 2023 menggunakan jaringan dari Diskominfo sehingga terdapat efisiensi anggaran tagihan internet.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah :

**Tabel 3.3.1.5**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Publik Biro Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					
						122.785.516.284	120.965.553.796	98,52
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.692.066.328	52.500.284.623	99,64	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.937.997.768	51.779.309.123	99,69	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	343.930.000	335.972.400	97,69	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	281.341.189	257.647.400	91,58	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	128.797.371	127.355.700	98,88	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	13.316.591.884	13.268.268.873	<b>99,99</b>
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.215.197.360	5.215.197.299	99,99
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.944.800	80.944.800	100,0
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.934.574.270	1.908.602.410	98,66
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.767.950.195	1.749.346.900	98,95
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000	49.934.390	99,75
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.267.867.259	4.264.243.074	99,92
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.403.339.055</b>	<b>3.357.844.700</b>	<b>98,66</b>
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	841.300.000	839.900.000	99,83
				Pengadaan Mebel	1.212.917.334	1.191.972.950	98,27
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.349.121.721	1.325.971.750	98,28
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.981.222.790</b>	<b>17.575.762.208</b>	<b>97,75</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.773.831	63.541.480	79,65
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.166.192.962	4.033.553.263	96,82
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.127.700.000	1.125.095.650	99,77
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.607.555.997	12.353.571.815	97,99
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.360.568.148</b>	<b>11.036.754.843</b>	<b>96,07</b>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000	216.576.839	93,76
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.880.091.696	1.811.575.770	96,36
				Pemeliharaan Mebel	23.975.000	19.200.000	80,08
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.472.255	295.477.530	88,08
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.991.033.527	7.878.892.434	98,60
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899.013.670	815.032.270	90,66
				<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>5.049.190.843</b>	<b>4.419.970.581</b>	<b>87,54</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.783.943	243.027.548	96,91
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	10.060.500	10,06
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.698.406.900	4.166.882.533	88,69
				<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>18.982.537.236</b>	<b>18.806.667.968</b>	<b>99,02</b>
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.311.580.500	8.268.889.347	99,49

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.332.683.000	7.222.235.410	98,49
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.338.273.736	3.315.543.211	99,32

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Indikator Kinerja 1.1.1**

**IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.** Pengukuran indicator IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dihitung berdasarkan data olahan questioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indicator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 91,52 dari target 88,70 atau dengan capaian 103,18%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

**Tabel 3.3.1.6**

**Capaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (91,52)	103,18	Sangat Tinggi

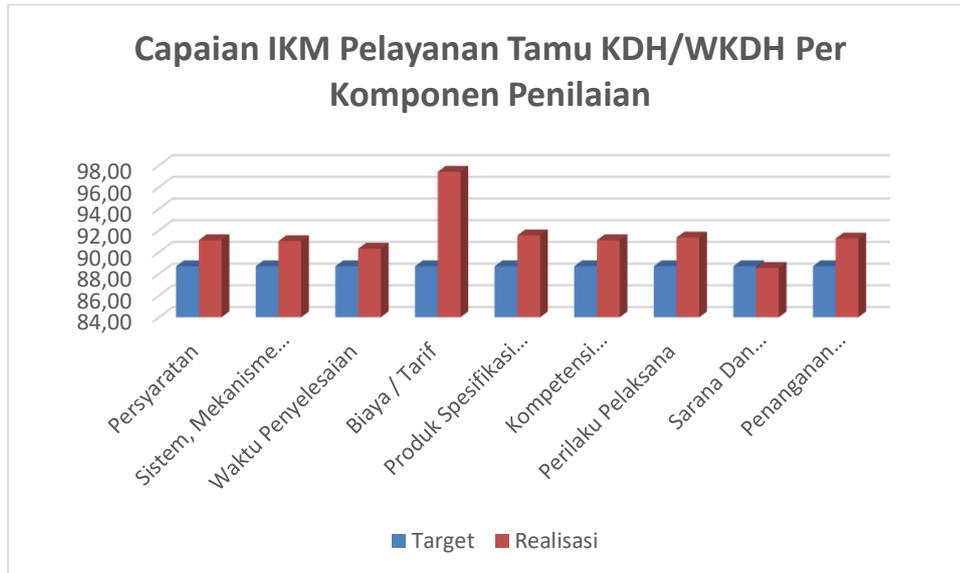
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomen Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Biro Umum memperoleh nilai komponen tertinggi yaitu pelayanan dilakukan secara gratis atau sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 97,41 dari target 88,70 dan nilai komponen terendah yaitu sarana dan prasarana 88,55 dari target 88,70. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan tamu rumah tangga KDH / WKDH biro umum tahun 2023 :

Grafik 6

### Capaian IKM Pelayanan Tamu KDH/WKDH Per Komponen Penilaian



Sumber : Data Olahan Biro Umum tahun 2023

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari 89,38 menjadi 91,52 atau meningkat 2,14 point. Perkembangan nilai IKM Pelayanan Tamu KDH/WKDH pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 7

### Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti persyaratan dari nilai 91,11 tahun 2022 menjadi 93,52 tahun 2023 atau turun sebesar 2,41 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tahun 2021 – 2023

Tabel 3.3.1.7

**Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 per Komponen**

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
1.	Persyaratan	93,41	93,41	93,52
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,43	90,43	90,38
3.	Waktu Penyelesaian	87,85	87,85	86,16
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	99,00
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,47	90,47	90,53
6.	Kompetensi Pelaksana	85,00	85,00	82,61
7.	Perilaku Pelaksana	88,65	88,65	88,05
8.	Sarana Dan Prasarana	83,93	83,93	84,35
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	90,39	90,39	89,79

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

**Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik

Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 3.3.1.8**

**Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	88,70	91,52	103,18	101,24
<b>Nilai Rata-rata</b>			88,70	91,52	103,18	101,24

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Capaian Tingkat Kepuasan Tamu KDH/WKDH tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 103,18. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH telah tercapai sebesar 101,24. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas pelayanan dan terus ditingkatkan agar nanti tidak turun capaiannya di tahun berikutnya.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Provinsi Jambi mencapai 90 sebagaimana yang tergambar pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.9

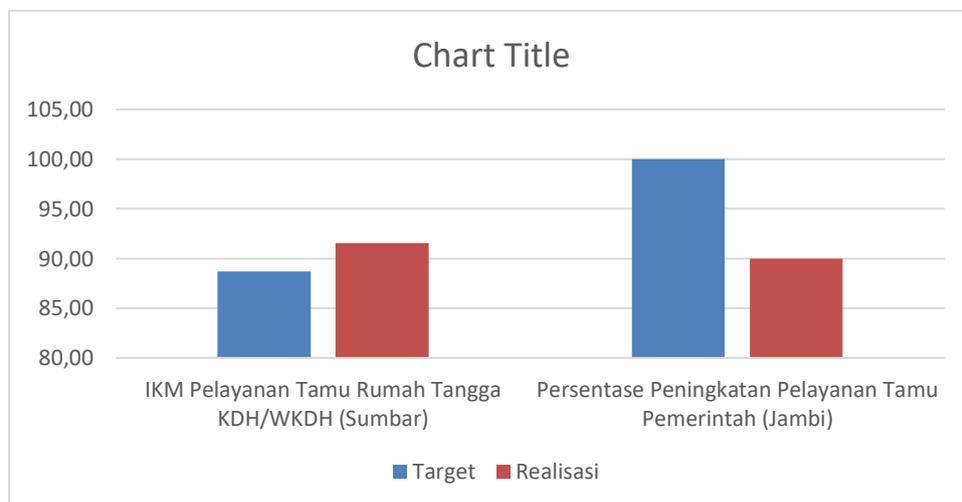
**Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Standar Provinsi Lain**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Keterangan
		Sumbar	Jambi	Sumbar	Jambi	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH (Sumbar)</li> <li>• Persentase Peningkatan Pelayanan Tamu Pemerintah (Jambi)</li> </ul>	88,70	100	91,52	90	Pada ketiga indicator ini menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Grafik 8

**Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH dengan Standar Provinsi Lain**



Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan.** Dalam Upaya pencapaian indikator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024, diantaranya :

- 1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga

KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,11 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah karena persyaratan yang diminta biro umum relative mudah dan tertuang dalam SOP Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH.

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,02 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.
- 3) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian cepat dan tidak berbelit karena sesuai dengan SOP yang ada, hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,32 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”
- 4) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 97,41 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis dan walaupun ada biaya biasanya digunakan untuk peminjaman fasilitas yang sesuai aturannya dikenakan tarif retribusi.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,55 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah produk dan spesifikasinya jelas tertera dalam SOP pelayanan biro umum, baik itu yang gratis maupun yang membutuhkan biaya retribusi.
- 6) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana sangat mumpuni hal ini dapat

dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,11 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya briefing yang dilakukan oleh pimpinan ditambah adanya bimtek untuk peningkatan kompetensi pelaksana di bidang pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH.

- 7) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana sangat mumpuni hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,35 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya briefing yang dilakukan oleh pimpinan ditambah adanya bimtek untuk peningkatan kompetensi pelaksana di bidang pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 91,26 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya pelaksana yang selalu stand by dalam menampung saran dan masukan dari stakeholders.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator nilai IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH pada Biro Umum, juga terdapat beberapa **Faktor yang Menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

- 1) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,55 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Salah satu sarana dan prasarana yang masih menjadi titik lemah adalah fasilitas internet terutama pada unit pelayanan Biro Umum di Istana Bung Hatta Bukittinggi.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024,** maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

- 1) Melakukan recruitment tenaga kontrak pramusaji yang akan menjadi pelayanan tamu KDH/WKDH
- 2) Melaksanakan dan mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan tamu KDH/WKDH dalam Bimtek terkait.
- 3) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 80 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 25 orang atau 31,25% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan</li> <li>• Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan pelayanan masih sedikit memiliki permasalahan terutama fasilitas internet yang cepat.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH terealisasi pada tahun 2023 sebesar 91,52% dari 88,70% dengan tingkat capaian sebesar 103,18% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.22.970.534.556 dan telah terealisasi sebesar Rp.22.734.474.665 atau sebesar 98,97%. Anggaran ini tersebar pada 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu 1) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ; dan 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah ; dan 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.22.970.534.556

CK : Capaian Kinerja (%) = 103,18%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.22.734.474.665

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp. 22.970.534.556 \times 103,18\%) - 22.734.474.665}{(Rp. 22.970.534.556 \times 103,18\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{23.700.997.555 - 22.734.474.665}{23.700.997.555} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 4,08%

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 4,08% untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah :

- d) Dalam pengumpulan data questioner, terutama untuk unit pelayanan tamu di Istana Bung Hatta dan Mess Bukit Lampu questioner dikirim softcopynya ke unit kerja tersebut, dan pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
- e) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.
- f) Sarana dan prasarana untuk jaringan internet pada Istana Bung Hatta mulai tahun 2023 menggunakan jaringan dari Diskominfo sehingga terdapat efisiensi anggaran tagihan internet.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH :

**Tabel 3.3.1.10**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		22.970.534.556	22.734.474.665	98,97
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.215.197.360	5.215.197.299	99,99
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.215.197.360	5.215.197.299	99,99
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.111.073.696	2.028.152.609	96,07
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.982.000	216.576.839	93,76
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	1.880.091.696	1.811.575.770	96,36

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>15.644.263.500</b>	<b>15.491.124.757</b>	99,02
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8.311.580.500	8.268.889.347	99,49
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	7.332.683.000	7.222.235.410	98,49

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

<b>Indikator Kinerja 1.1.2</b>	<b>IKM Pelayanan Pimpinan</b>
--------------------------------	-------------------------------

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.** Pengukuran indikator IKM Pelayanan Pimpinan dihitung berdasarkan data olahan questioner yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator yang telah ditetapkan Biro Umum memperoleh nilai sebesar 90,14 dari target 88,70 atau dengan capaian 101,62%, seperti yang tergambar dalam table berikut :

**Tabel 3.3.1.11**

**Capaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (90,14)	101,62	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

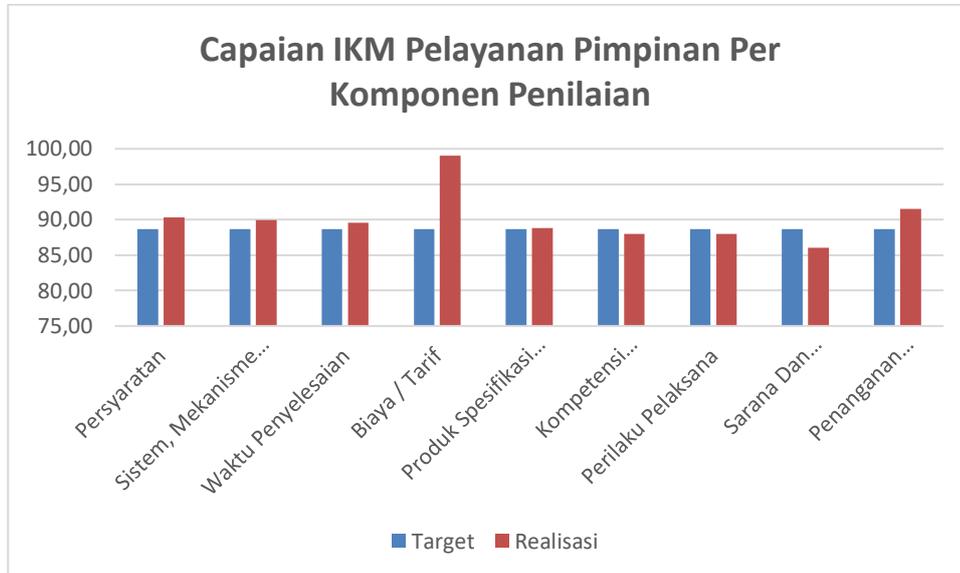
Nilai IKM didapat dari penyusunan instrumen berupa kuesioner dilakukan dengan mempedomani ruang lingkup survei seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengukuran indeks kepuasan pelayanan tamu ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.

Biro Umum memperoleh nilai komponen tertinggi yaitu pelayanan dilakukan secara gratis atau sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 99,00 dari target 88,70 dan nilai komponen terendah yaitu sarana dan prasarana 86,04 dari

target 88,70. Berikut rincian hasil pengolahan questioner IKM pelayanan pimpinan biro umum tahun 2023 :

**Grafik 9**

**Capaian IKM Pelayanan Pimpinan Per Komponen Penilaian**



Sumber : Data Olahan Biro Umum tahun 2023

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.** Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari 89,18 menjadi 90,14 atau meningkat 0,96 point. Perkembangan nilai IKM Pelayanan Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 10**

**Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023**



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Meskipun secara keseluruhan nilai tingkat kepuasan pelayanan pimpinan meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen terjadi penurunan nilai pada beberapa komponen seperti Kompetensi Pelaksana dari nilai 95,46 tahun 2022 menjadi 88,00 tahun 2023 atau turun sebesar 7,46 point. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengolahan data questioner yang telah dilaksanakan. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan kepuasan pelayanan pimpinan sekretariat daerah tahun 2021 – 2023

Tabel 3.3.1.12

**Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 per Komponen**

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
1.	Persyaratan	91,93	91,93	90,36
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	88,39	88,39	89,96
3.	Waktu Penyelesaian	88,39	88,39	89,57
4.	Biaya / Tarif	99,00	99,00	99,00
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,46	95,46	88,79
6.	Kompetensi Pelaksana	95,46	95,46	88,00
7.	Perilaku Pelaksana	88,39	88,39	88,00
8.	Sarana Dan Prasarana	53,04	60,11	86,04
9.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	95,46	95,46	91,54

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

**Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya kualitas pelayanan public melalui indicator IKM Pelayanan Publik

Biro Umum, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.1.13

**Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM Pelayanan Pimpinan	88,70	90,14	101,62	99,71
<b>Nilai Rata-rata</b>			88,70	90,14	101,62	99,71

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Capaian Tingkat Kepuasan Pelayanan Pimpinan tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 101,62. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra Tingkat Kepuasan Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH telah tercapai sebesar 99,71. Hal ini berarti Biro Umum perlu meningkatkan kualitas pelayanan agar nanti mampu mencapai target di akhir periode renstra.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada dibawah provinsi tersebut dimana Biro Umum Provinsi Jawa Barat mencapai 94,43 sebagaimana yang tergambar pada table dan grafik berikut :

TABEL 3.3.1.14

**Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan dengan Standar Provinsi Lain**

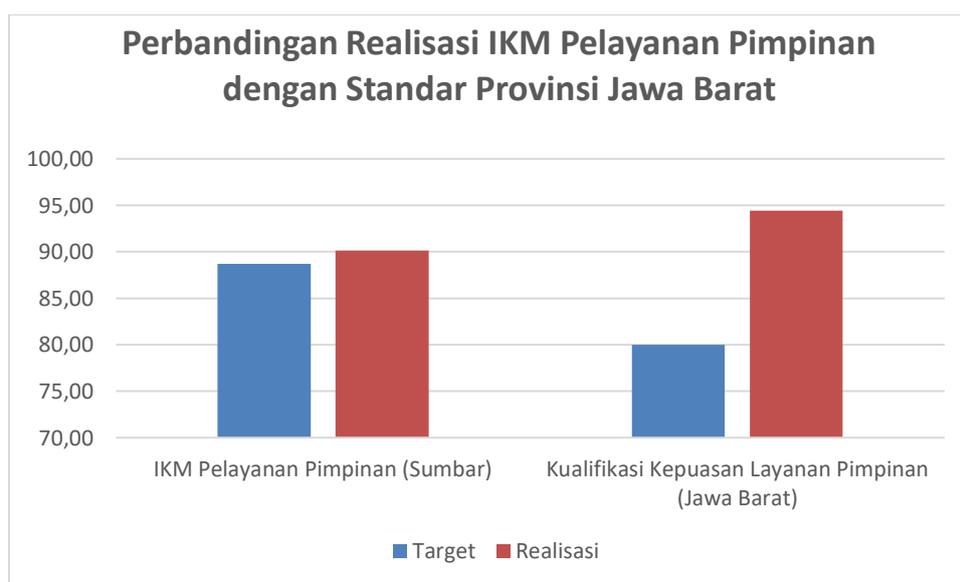
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Keterangan
		Sumbar	Jawa Barat	Sumbar	Jawa Barat	

1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKM Pelayanan Pimpinan (Sumbar)</li> <li>• Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan (Jawa Barat)</li> </ul>	88,70	80	90,14	94,43	Pada ketiga indicator ini menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Grafik 11**

**Perbandingan Realisasi IKM Pelayanan Pimpinan dengan Standar Provinsi Lain**



Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan.** Dalam Upaya pencapaian indicator kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan tahun 2024, diantaranya :

- 1) Persyaratan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap persyaratan dalam mendapat pelayanan Pimpinan tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 90,36 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 "Sangat Baik". Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah karena persyaratan yang diminta biro umum relative mudah dan tertuang dalam SOP Pelayanan Pimpinan

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap SOP dalam mendapat pelayanan tamu rumah tangga KDH/WKDH tidak sulit hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,96 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah SOP yang tersosialisasi dengan baik dan mudah dimengerti.
- 3) Waktu Penyelesaian : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap waktu penyelesaian cepat dan tidak berbelit karena sesuai dengan SOP yang ada, hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 89,57 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”
- 4) Biaya / Tarif : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Biaya / Tarif dalam mendapat pelayanan pimpinan adalah gratis hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 99,00 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah biaya yang dibutuhkan adalah gratis.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap Produk Pelayanan pimpinan sangat jelas hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,79 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah produk dan spesifikasinya jelas tertera dalam SOP pelayanan biro umum.
- 6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap setiap pengaduan, saran dan masukan dalam hal pelayanan pimpinan cepat ditanggapi hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 95,46 dengan predikat Sangat Baik dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan tercapainya adalah adanya pelaksana yang selalu stand by dalam menampung saran dan masukan dari stakeholders.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator nilai IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH

pada Biro Umum, juga terdapat beberapa **Faktor yang Menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

- 1) Kompetensi Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap kompetensi pelaksana dalam melaksanakan pelayanan pimpinan masih kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,00 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pimpinan ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.
- 2) Perilaku Pelaksana : pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap perilaku pelaksana dalam melaksanakan pelayanan pimpinan masih sedikit kurang baik hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 88,00 dengan predikat “Sangat Baik” dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”. Faktor yang menyebabkan kegagalan dari unsur ini adalah karena kurangnya kemauan belajar dari pelaksana yang melayani pimpinan ditambah tidak adanya bimtek yang relevan untuk diikuti oleh pelaksana pelayanan.
- 3) Sarana dan Prasarana pada unsur ini mengidentifikasi bahwa responden menganggap sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan Pimpinan masih sangat kurang hal ini dapat dilihat bahwa untuk unsur ini mendapat nilai 86,04 dengan predikat “Baik” dimana targetnya yaitu 88,70 “Sangat Baik”.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024**, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

- 1) mengikutsertakan ASN dan Non ASN yang bertugas secara langsung dalam pelaksanaan pelayanan dalam Bimtek terkait. Namun jika tidak ada instansi yang melaksanakan maka diusahakan untuk melaksanakan bimtek sendiri guna meningkatkan kompetensi dan perilaku pelaksana.
- 2) Memperbaharui sarana dan prasarana baik melalui pemeliharaan atau melalui pengadaan baru sesuai ketersediaan anggaran

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 40 ASN dan Non ASN Pelayanan Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai tata cara pelayanan	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 27 orang atau 67,50% dari total ASN dan non ASN petugas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan</li> <li>• Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

2. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator kinerja IKM Pelayanan Pimpinan terealisasi pada tahun 2023 sebesar 90,14% dari 88,70% dengan tingkat capaian sebesar 101,62% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.47.122.915.400 dan telah terealisasi sebesar Rp.45.730.794.508 atau sebesar 97,05%. Anggaran ini tersebar pada 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 5 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ; 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ; dan 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu 1) Pengadaan Kendaraan Dinas

- Operasional atau Lapangan ; 2) Pengadaan Mebel ; dan 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; dan 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu : 1) Pemeliharaan Mebel ; 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ; 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ; dan 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 3 sub kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- f. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA	: Pagu Anggaran	= Rp.47.122.915.400
CK	: Capaian Kinerja (%)	= 101,62%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.45.730.794.508

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. } 47.122.915.400 \times 101,62\%) - 45.730.794.508}{(\text{Rp. } 47.122.915.400 \times 101,62\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{47.886.306.629 - 45.730.794.508}{47.886.306.629} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 4,50%

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 4,50% untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah :

- a) Dalam pengumpulan data questioner, pengumpulan datanya disampaikan melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
- b) Sarana dan prasarana pada unit kerja pelayanan yang masih dalam kategori rusak ringan hingga sedang dilakukan pemeliharaan, sehingga terdapat efisiensi anggaran pengadaan sarana dan prasarana.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH :

**Tabel 3.3.1.15**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Indikator Kinerja IKM Pelayanan Pimpinan**

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	IKM Pelayanan Pimpinan	Program		47.122.915.400	45.730.794.508	97,05
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.101.394.524	8.053.071.574	99,40
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.944.800	80.944.800	100,0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.934.574.270	1.908.602.410	98,66
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.767.950.195	1.749.346.900	98,95
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.058.000	49.934.390	99,75
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.267.867.259	4.264.243.074	99,92

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.403.339.055</b>	<b>3.357.844.700</b>	98,66
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	841.300.000	839.900.000	99,83
			Pengadaan Mebel	1.212.917.334	1.191.972.950	98,27
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.349.121.721	1.325.971.750	98,28
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.981.222.790</b>	<b>17.575.762.208</b>	97,75
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.773.831	63.541.480	79,65
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.166.192.962	4.033.553.263	96,82
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.127.700.000	1.125.095.650	99,77
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.607.555.997	12.353.571.815	97,99
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.249.494.452</b>	<b>9.008.602.234</b>	97,40
			Pemeliharaan Mebel	23.975.000	19.200.000	80,08
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.472.255	295.477.530	88,08
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.991.033.527	7.878.892.434	98,60
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899.013.670	815.032.270	90,66
			<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>5.049.190.843</b>	<b>4.419.970.581</b>	87,54
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.783.943	243.027.548	96,91
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	10.060.500	10,06
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.698.406.900	4.166.882.533	88,69
			<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>3.338.273.736</b>	<b>3.315.543.211</b>	99,32
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.338.273.736	3.315.543.211	99,32

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

### 3. 3.2 Tujuan 2 : “Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel”

Tujuan ke-2 Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 20216 – 2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel diukur melalui 1 indikator kinerja tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indicator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2.1**

#### Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	70,85	73,19	103,30	70,00	104,56

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indicator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan pertama telah dicapai dengan sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 103,30%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 104,56%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2023

#### Sasaran Strategis 2.1

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.** Pengukuran capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 700/28/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 02 Agustus 2023 memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 73,19 dengan kategori BB dari target 70,85 atau dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 103,30%, nilai ini menunjukkan bahwa AKIP

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, bekinerja baik dan memiliki system manajemen kinerja handal.

**TABEL 3.3.2.2**

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2.1**

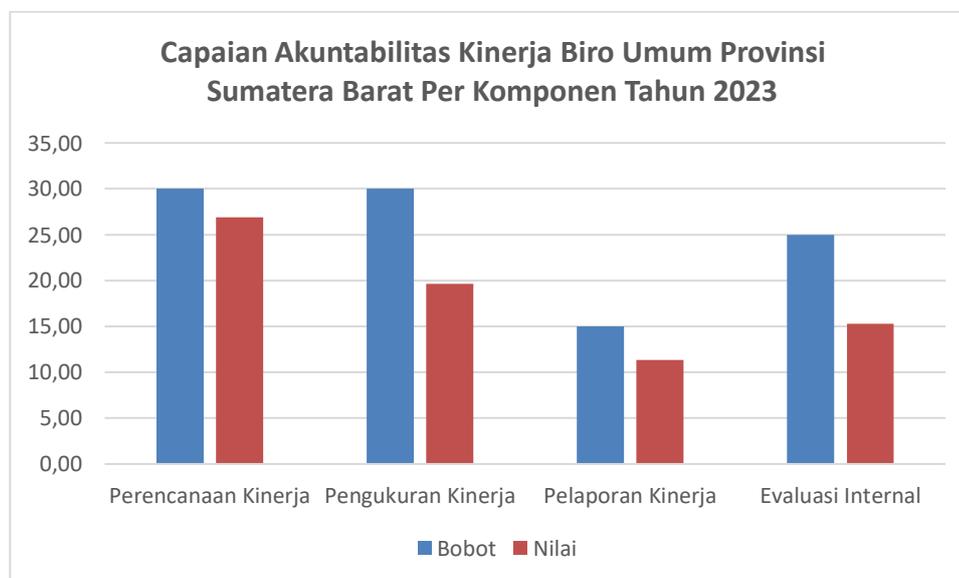
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	BB (70,85)	BB (73,19)	103,30	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		BB (70,85)	BB (73,19)	103,30	Sangat Tinggi

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu nilai perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Berdasarkan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat terhadap empat komponen tersebut, biro umum memperoleh nilai tertinggi pada komponen perencanaan kinerja 26,89 dari bobot 30,00 dan komponen terendah pelaporan kinerja 11,35 dari bobot 15. Berikut rincian komponen nilai akuntabilitas kinerja biro umum tahun penilaian 2023 :

**Grafik 12**

**Capaian Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Provinsi Sumatera Barat  
Per Komponen Tahun 2023**



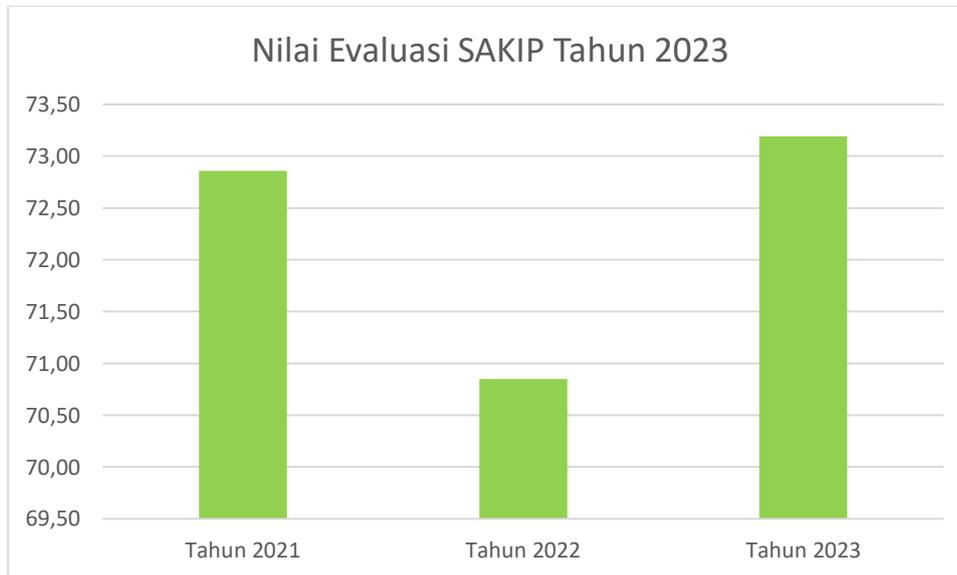
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.** Dibanding dengan capaian sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari nilai 70,85

menjadi 73,19 atau meningkat 2,34 point. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 13

### Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023



**Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023**

Meskipun secara keseluruhan nilai evaluasi SAKIP meningkat dari tahun ke tahun, namun jika biro umum perlu terus melakukan perbaikan agar dapat terus memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat. Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021 – 2023

Tabel 3.3.2.3

### Nilai Komponen Tingkat Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Tahun 2021 - 2023

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	25,06	24,66	26,89
2.	Pengukuran Kinerja	17,00	16,60	19,66
3.	Pelaporan Kinerja	9,93	9,53	11,35
4.	Evaluasi Internal	6,46	6,06	15,29

No.	Aspek Komponen Penilaian	Nilai		
		2021	2022	2023
5.	Pencapaian Kinerja	14,40	14,00	
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		72,86	70,85	73,19
<b>Kategori</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

**Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 3.3.2.4**

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	70,85	73,19	103,30	70,00	104,56
<b>Nilai Rata-rata</b>			<b>70,85</b>	<b>73,19</b>	<b>103,30</b>	<b>70,00</b>	<b>104,56</b>

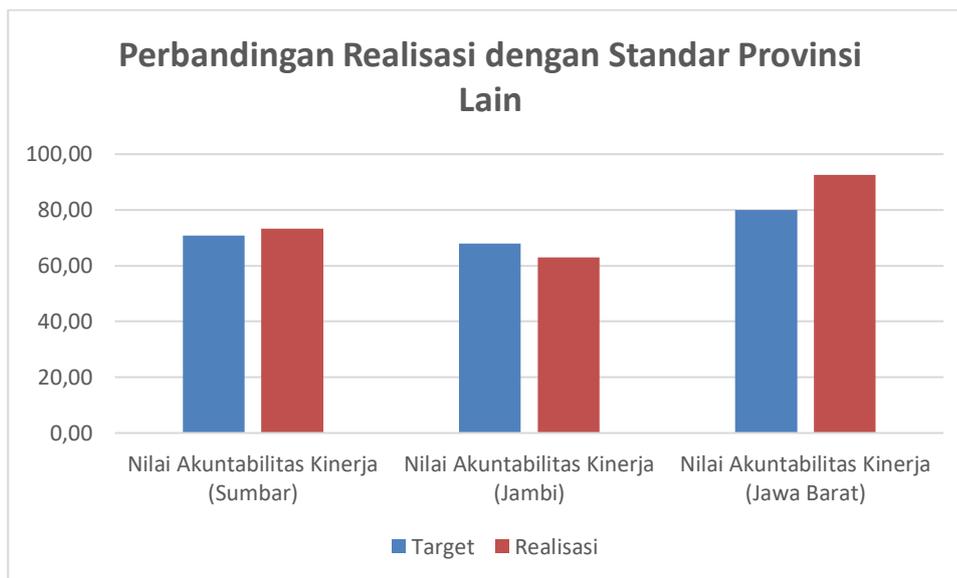
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 103,30. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra nilai akuntabilitas kinerja biro umum telah tercapai sebesar 104,56. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan menjaga kualitas dokumen SAKIP dan meningkatnya agar dapat mencapai nilai dengan kategori A.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Jika dibandingkan dengan Tingkat kepuasan pelayanan public pada Biro Umum Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi, Biro Umum Provinsi Sumatera Barat berada diatas kedua provinsi Jambi yang hanya mencapai nilai 63 dan dibawah Provinsi Jawa Barat yang mencapai 92,64, sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut :

**Grafik 14**

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Provinsi Lain**



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Dalam upaya pencapaian indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2023, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, diantaranya :

1) Perencanaan Kinerja

- Biro Umum sudah menyusun seluruh dokumen perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis, indicator kinerja utama, perjanjian kinerja, rencana aksi dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan mempedomani pedoman teknis perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan melalui peraturan gubernur sumatera barat nomor 71 tahun 2020 tentang

pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah daerah provinsi Sumatera barat.

- Setiap unit / satuan kerja serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, tujuan dan sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indicator kinerja sudah memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevan, time bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- Indikator Kinerja Utama telah menggambarkan Kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode perencanaan strategis.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi / hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).

## 2) Pengukuran Kinerja

- Biro Umum telah memiliki SOP terkait pengumpulan dan pengukuran kinerja, definisi operasional atas kinerja serta mekanisme yang jelas atas pengumpulan kinerja.
- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mencapai kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang

## 3) Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja telah disusun, dialporkan tepat waktu, telah direviu dan dipublikasikan.

- Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 202 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja.
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan / kegagalan mencapai target kinerja beserta Upaya nyata dan / atau hambatannya

#### 4) Evaluasi Internal

- Biro Umum telah memiliki SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal Sebagai Pedoman dalam memantau capaian kinerja.
- Pemantauan capaian kinerja pada Biro Umum telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berjenjang dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja juga terdapat beberapa **factor yang penghambat** tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

- 1) Notulen rapat pemantauan capaian kinerja belum memaparkan analisa terkait factor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja.
- 2) Masih terdapat pegawai yang belum memahami dan peduli serta belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.
- 3) Pemantauan capaian kinerja masih belum konsisten dilakukan secara bulanan.
- 4) Belum terdapat perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya

- 5) Secara rata-rata, pencapaian kinerja lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- 6) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Aplikasi E.Sakip baru dapat menjadi alat pengumpulan data kinerja (input data) belum menjadi alat pengukuran capaian kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan / penghapusan jabatan.
- 8) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran.
- 9) Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- 10) Dokumen Laporan Kinerja belum memberi informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional / internasional (*Benchmark Kinerja*)
- 11) Informasi atas efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Dokumen Laporan Kinerja masih belum memadai.
- 12) Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 13) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi dan perencanaan kinerja berikutnya.
- 14) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kerja.
- 15) Pemantauan capaian kinerja belum dilaksanakan sesuai SOP, belum membahas perkembangan kinerja secara mendalam dan belum memberikan saran perbaikan kinerja.
- 16) Pemantauan masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.
- 17) Belum seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP ditindaklanjuti.
- 18) Hasil Evaluasi AKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan, peningkatan, efisiensi dan efektifitas kinerja

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja tahun 2024, maka Biro Umum Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE tahun 2023. Berikut matrik tindak lanjut LHE tahun 2023 :

**TABEL 3.3.2.5**  
**MATRIK TINDAK LANJUT PERENCANAAN KINERJA**

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulanan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan Analisa dan pemberian Solusi atas permasalahan yang ditemukan.	Melakukan monev kinerja tiap bulannya	Seluruh ASN	12 Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja terhadap seluruh bagian dan pegawai	Melakukan rapat kinerja bulanan dan menyampaikan target dan realisasi kinerja masing-masing ASN	Seluruh ASN	12 Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
3.	Melakukan perbaikan / penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja berdasarkan hasil analisis perbaikan kinerja	Melakukan rapat tindak lanjut rekomendasi perbaikan dokumen SAKIP Biro Umum	Seluruh Pejabat STruktural dan Fungsional	Bulan Agustus 2023	Kepala Biro Umum	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2023

**TABEL 3.3.2.6**  
**MATRIK TINDAK LANJUT PENGUKURAN KINERJA**

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi <a href="http://sakup.sumbarprov.go.id">sakup.sumbarprov.go.id</a> dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	Mengupload seluruh capaian kinerja tiap bulannya	Tiap bulan	12 Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian penghasilan dan penempatan / penghapusan jabatan	Membuat SK Penempatan ASN sesuai kelas jabatan	1 Bulan	Bulan Agustus	Kepala Biro Umum	Selesai

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
3.	Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam hal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam rangka mencapai kinerja	Rapat capaian kinerja dalam perencanaan anggaran 2024 dan perubahan 2023	2 Bulan	Juli dan November	Kepala Biro Umum	Selesai
4.	Melakukan upaya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Menggunakan teknologi informasi dalam mengumpulkan data kinerja seperti aplikasi whatapps	Tiap bulan	12 bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
5.	Melakukan pemantauan rutin atas kinerja, apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisa dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan	Laporan Realisasi Rencana Aksi masing-masing jabatan	Tiap Bulan	12 Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
6	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja	Menyampaikan hasil realisasi kinerja kepada masing-masing ASN dan memberikan penghargaan atas capaian yang telah dilakukan	Seluruh ASN	12 Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2022

**TABEL 3.3.2.7**

**MATRIK TINDAK LANJUT PELAPORAN KINERJA**

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> ), jika tidak ada agar tetap dijelaskan dalam Laporan Kinerja	Melakukan perbandingan kinerja dengan Biro Umum Provinsi lain	1 kali pelaksanaan	Bulan Desember	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Laporan Kinerja pada Setiap Sasarannya.	Memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan data keinerja	Tiap Bulan	Tiap Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
3.	Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan Kinerja	Mengikutsertakan pegawai dalam pengukuran kinerja dan diberikan penghargaan terhadap capaiannya.	Tiap Bulan	Tiap Bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
4.	Memanfaatkan informasi Laporan Kinerja dalam hal penyesuaian aktivitas, anggaran, evaluasi dan perencanaan kinerja berikutnya.	Rapat capaian kinerja dalam perencanaan anggaran 2024 dan perubahan 2023	2 Bulan	Juli dan November	Kepala Biro Umum	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2022

**TABEL 3.3.3.8**

**MATRIK TINDAK LANJUT EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Proses Penyelesaian
1.	Mempedomani SOP Evaluasi / Pemantauan Internal dalam melakukan pemantauan capaian kinerja	Melakukan sosialisasi SOP Pengukuran kinerja	1 kali pelaksanaan	Bulan Agustus	Kepala Biro Umum	Selesai
2.	Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja, baik lingkup bagian maupun lingkup biro, minimal membahas mengenai target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong, factor penghambat dan rekomendasi	Membuat laporan monev menampilkan target kinerja, realisasi kinerja, factor pendorong, factor penghambat dan rekomendasi	Tiap bulan	Tiap bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
3.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip (sakip.sumbarprov.go.id) dalam melakukan pemantauan capaian kinerja	Mengupload laporan capaian kinerja tiap bulan	Tiap bulan	Tiap bulan	Kepala Biro Umum	Selesai
4.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi Evaluasi AKIP Inspektorat dan menuangkan dalam matriks tindak lanjut.	Membuat matriks tindak lanjut	1 kali pelaksanaan	Bulan Agustus	Kepala Biro Umum	Selesai

Sumber : LHE Evaluasi AKIP Tahun 2022

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 70 ASN Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian TU Biro (17 Orang) atau 24,29% dari total ASN Biro Umum	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing bagian untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja terealisasi pada tahun 2023 sebesar 73,19% dari 70,85% dengan tingkat capaian sebesar 103,30% didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp.2.024.699.314 dan telah terealisasi sebesar Rp.1.941.285.909 atau sebesar 95,88%. Anggaran ini tersebar pada 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Perangkat Daerah; dan 2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; dan 2). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ; dan 2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Penyediaan Bahan Logistik Kantor ; dan 2). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{(\text{PA} \times \text{CK})} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran = Rp.2.024.699.314

CK : Capaian Kinerja (%) = 103,30%

RA : Realisasi Anggaran = Rp.1.941.285.909

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp. } 2.024.699.314 \times 103,30\%) - 1.941.285.909}{(\text{Rp. } 2.024.699.314 \times 103,30\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{2.091.514.391 - 1.941.285.909}{2.091.514.391} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 7,18\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 7,18% untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah :

- a) Acara Forum Perangkat Daerah Biro Umum yang awalnya direncanakan di Bukittinggi diubah tempat pelaksanaannya ke Aula Kantor Gubernur sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.
- b) Pengumpulan data realisasi kinerja untuk ASN tidak lagi dilakukan dengan monev langsung ke unit kerja cukup dengan menyampaikan data realisasi per bulannya melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja biro umum :

**Tabel 3.3.2.9**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		2.024.699.314,00	1.941.285.909,00	95,88
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.591.477	145.842.800	93,73
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.090.977	86.704.800	94,15
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.500.500	59.138.000	93,13
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	528.387.500	486.924.609	92,15
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	422.000.000	383.358.459	90,84

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	106.387.500	103.566.150	97,35
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>182.294.587</b>	<b>155.887.500</b>	85,51
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	100
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.294.587	155.887.500	85,51
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>714.936.000</b>	<b>709.253.000</b>	99,21
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	491.273.000	487.210.000	99,17
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	223.663.000	222.043.000	99,28
				<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>443.489.750</b>	<b>443.378.000</b>	99,97
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	443.489.750	443.378.000	99,97

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

### 3.3.3 Tujuan 3 : “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah”

Tujuan ke-3 Renstra Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah diukur melalui 1 indikator kinerja tujuan yaitu Persentase Realisasi PAD. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.3.1**

## Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Tahun 2023		Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
				Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi PAD	95%	70%	73,68%	95%	73,68%

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan ketiga hanya dicapai dengan predikat sedang, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 73,68%. Jika dilihat pada target akhir Renstra, maka target tersebut telah tercapai sebesar 73,68%. Berikut analisis capaian sasaran kinerja Tahun 2023

## Sasaran Strategis 3.1

## Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi

**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.** Pengukuran capaian sasaran Meningkatkan Pencapaian Target Retribusi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu % Realisasi Penerimaan Retribusi. Berdasarkan hasil realisasi anggaran tahun 2023, penerimaan retribusi dari Biro Umum hanya mencapai 70% dari target 95% dalam kategori sedang sesuai dengan Permendagri RI Nomor 08 Tahun 2017.

TABEL 3.3.3.2

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 3.1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	70%	73,68%	Sedang
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>	95%	70%	73,68%	Sedang

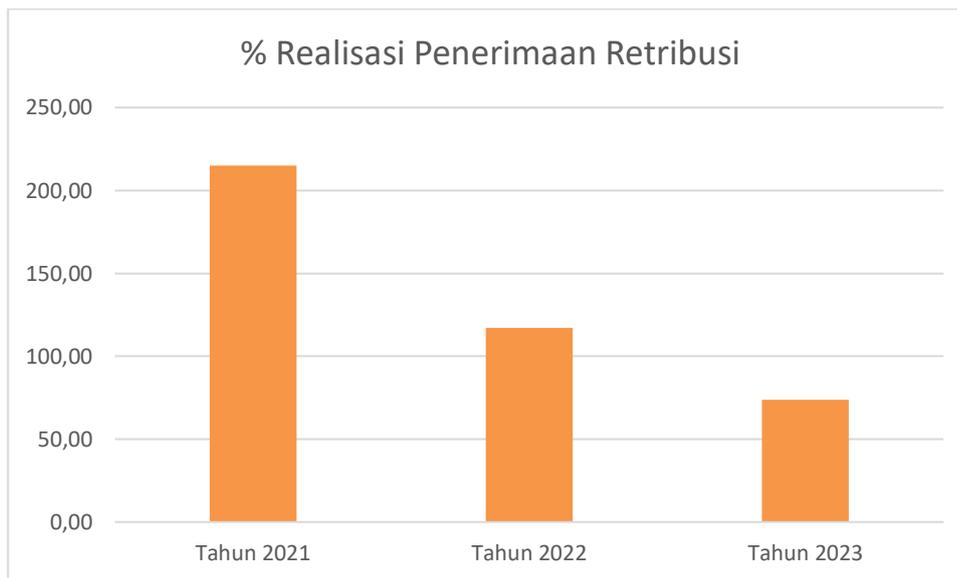
Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

% Realisasi Penerimaan Retribusi diukur dengan realisasi pendapatan retribusi biro umum dibandingkan dengan target pendapatan yang dibebankan kepada Biro Umum.

**Perbandingan dengan Realisasi Tahun sebelumnya.** Dibanding dengan capaian sebelumnya, capaian tahun ini menurun dari nilai 111,35 menjadi 73,68 atau turun 37,67 point. Perkembangan % Realisasi Penerimaan Retribusi pada Biro Umum selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 15**

**Realisasi Akuntabilitas Kinerja Biro Umum selama Tahun 2021 s.d Tahun 2023**



Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

Meskipun secara keseluruhan % Realisasi Penerimaan Retribusi menurun dari tahun ke tahun, namun ada faktor eksternal yang diluar kendali biro umum untuk mencapai target retribusi yang telah ditetapkan.

**Perbandingan realisasi dengan Dokumen Renstra.** Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Umum Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026 bahwa Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi melalui indicator % Realisasi Penerimaan Retribusi, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.3.3.3

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran % Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2023 dengan Target RPJMD / Renstra tahun 2021 – 2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	70%	73,68%	95%	73,68%
<b>Nilai Rata-rata</b>			95%	70%	73,68%	95%	73,68%

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Capaian % Realisasi Penerimaan Retribusi tahun 2023 mendukung capaian target Renstra / RPJMD sebesar 73,68. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD dan Renstra % Realisasi Penerimaan Retribusi biro umum baru tercapai sebesar 73,68. Hal ini berarti Biro Umum hanya membutuhkan peningkatan kinerja agar mampu mencapai target retribusi di akhir tahun renstra.

**Perbandingan Realisasi dengan Standar Nasional.** Sampai saat ini, kami belum menemukan data pembandingan terhadap target retribusi Biro Umum oleh karena itu perbandingan realisasi dengan standar nasional atau dengan provinsi lain belum bisa ditampilkan.

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan.** Dalam upaya pencapaian indikator kinerja % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2023, terdapat beberapa factor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, diantaranya karena sebagian besar dari adanya pemakaian OPD kabupaten/Kota atau pihak swasta.

Disamping Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2023, juga terdapat **factor yang menghambat** tercapainya sasaran kinerja ini karena

Capaian kinerja realisasi penerimaan retribusi Biro Umum hanya mencapai 70,00% dari target 95%. Kegagalan mencapai ini disebabkan karena adanya penurunan pemakaian kekayaan daerah dalam hal ini retribusi pemungutan pemakaian Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu. penurunan ini disebabkan karena penurunan OPD lingkup provinsi yang menggunakan Istana Bung Hatta dan Mess Bukti Lampu karena adanya rasionalisasi anggaran OPD dan acara-acara dialihkan pada ruang rapat kantor atau ruang kantor OPD lain yang bersifat gratis

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja tahun 2024**, maka Biro Umum perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternative Upaya tindak lanjut, diantaranya :

- a. Meningkatkan promosi pendapatan retribusi Biro Umum ke Kabupaten / Kota dan pihak swasta.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan peningkatan retribusi tersebut.
- c. Mendorong OPD Provinsi yang memiliki anggaran sewa gedung untuk melaksanakan acara di Istana Bung Hatta / Mess Bukit Lampu dibanding dengan acara di Hotel

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.** Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap pelayanan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 104 ASN dan Non ASN Biro Umum diharapkan bisa memahami dan menguasai pelayanan dalam	ASN dan Non ASN yang memahami tata cara pelayanan baru sebatas level structural, fungsional dan koordinator yaitu hanya sebanyak 47 orang atau 45,19% dari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan briefing secara rutin kepada seluruh ASN dan non ASN petugas pelayanan</li> <li>• Mengikuti ASN dan non ASN petugas pelayanan untuk mengikuti bimtek pelayanan public.</li> </ul>

pencapaian target retribusi	total ASN dan non ASN petugas pelayanan	
-----------------------------	-----------------------------------------	--

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

## 2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian kinerja telah memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tupoksi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

## 3. Ketersediaan anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan indicator % Realisasi Penerimaan Retribusi Biro Umum tahun 2023 terealisasi pada tahun 2023 sebesar 70% dari 95% dengan tingkat capaian sebesar 73,68% didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi namun tidak didukung dengan anggaran yang tersebar pada 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu 1). Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah; dan 2). Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan.

Sesuai dengan perhitungan Tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA	: Pagu Anggaran	= Rp.0
CK	: Capaian Kinerja (%)	= 73,68%
RA	: Realisasi Anggaran	= Rp.0

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.0} \times 73,68\%) - 0}{(\text{Rp.0} \times 73,68\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{0 - 0}{0} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Umum telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 0% untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini. Faktor yang menjadi kunci efisiensi anggaran adalah :

- a) Pengumpulan data realisasi pendapatan retribusi tidak lagi dilakukan dengan monev langsung ke unit kerja cukup dengan menyampaikan data realisasi per bulannya melalui aplikasi whatapps sehingga dapat melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan BBM.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja biro umum :

**Tabel 3.3.3.4**

**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan	0	0	0

Sumber : Data Olahan Biro Umum Tahun 2023

### 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 19.162.519.700,-. Anggaran tersebut tersebar di 1 program, 11 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Hingga triwulan IV Tahun 2023, dari pagu sebesar Rp.124.810.215.598 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.122.906.839.705 atau sebesar 98,47%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 16**

#### Perkembangan Realisasi Belanja dibandingkan Target Penyerapan Tahun 2023



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 belum mencapai target penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir triwulan di bulan Desember 2023 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar 1,53%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing bagian di lingkup Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang

dibuat. Untuk memperbaiki keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1

**Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pelayan Tamu Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	IKM	88,50	91,52	103,41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	124.810.215.598	122.906.839.705	98,47%
		Pelayanan							
		Tamu							
		KDH/WKDH							
		IKM	88,50	90,14	101,85				
		Pelayanan							
		Pimpinan							
		IKM	88,50	89,75	101,41				
		Pelayanan							
		Administrasi							
		Keuangan							
		Sekretariat							
		Keuangan							
		Setda							
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Umum	70,85	73,19	103,30				
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	70%	73,68%				
<b>Rata-rata</b>					96,73%			98,47%	

Sumber : Data Olahan Biro Umum 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sebesar 98,47% yang berada pada 1 program dapat tercapai kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,73%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pimpinan dan Tamu Pemerintah Daerah serta Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022, capaian realisasi anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,39%, dimana realisasi anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 96,08% dan ditahun 2023 hanya 98,47% sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

**Grafik 17**

**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Walaupun terjadi penurunan persentase serapan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum serapan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Biro Umum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dari 38 sub kegiatan hanya terdapat 6 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%. Adapun sub kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dari anggaran Rp.182.294.587 terealisasi Rp.155.887.500 dengan capaian 85,51%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah adanya ketidaktepatan dalam memperkirakan belanja pada saat perubahan anggaran sehingga terjadi sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari anggaran Rp.79.773.831 terealisasi Rp.63.541.480 dengan capaian 79,65%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah telah adanya aplikasi srikandi untuk efisiensi kegiatan surat menyurat.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dari anggaran Rp.23.975.000 terealisasi Rp19.200.000 dengan capaian 80,08%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dari anggaran Rp.335.472.255 terealisasi Rp295.477.530 dengan capaian 88,08%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah efisiensi atas belanja pemeliharaan.
5. Sub Kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari anggaran Rp.100.000.000 terealisasi Rp.10.060.500 dengan capaian 10,06%. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% adalah tidak dilaksanakannya medical chek up untuk Wakil Kepala Daerah.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari anggaran Rp.4.698.406.900 terealisasi Rp.4.166.882.533 dengan capaian 88,69%. Penyebab realisasi keuangan

dibawah 90% adalah tidak tercapainya target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.

6 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana sampai akhir Tahun Anggaran 2023 terlihat realisasi keuangan mencapai 98,47% dan realisasi pada pencapaian sasaran strategis mencapai 96,73% atau tergolong dalam kriteria Sangat Baik.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024, maka Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan.
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat.
3. Setiap Bagian adaptif terhadap kebijakan anggaran dan segera melakukan penyesuaian agar pekerjaan tidak tertunda.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **4.1. Kesimpulan**

LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Biro Umum dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum diselenggarakan dalam rangka pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, yang dengan penuh tantangan tetap dapat terlaksana dengan cukup baik. Seluruh indikator kinerja Biro Umum dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali target pendapatan yang hanya mencapai 70,00%.

Walaupun demikian, setiap pencapaian perlu dilakukan evaluasi, agar mendapat feedback guna perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, juga untuk mengetahui lebih dini terhadap hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, agar dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pimpinan maupun kepada seluruh pihak (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum. Selain itu, diharapkan juga adanya feedback atau umpan balik agar hasil (outcomes) yang diharapkan dari setiap program dapat memberikan dampak yang baik bagi stakeholders dan customers Biro Umum.

Selain itu, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi peningkatan dan pengembangan kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi dapat diwujudkan.

#### 4.2. Tindak Lanjut Kedepan

Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2024 diharapkan terus mengalami peningkatan. Dalam rangka menjaga dan mencapai target kinerja tahun 2024, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa strategi, diantaranya :

1. Memberikan pelatihan bimtek yang relevan bagi ASN dan Non ASN secara maksimal terkhusus yang berhubungan langsung dengan capaian kinerja Biro Umum.
2. Melaksanakan seluruh tindak lanjut dari Inspektorat atau BPK baik berupa audit, revidu dan sejenisnya terhadap pelaksanaan anggaran dan target kinerja Biro Umum
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian kinerja dan capaian anggaran.
4. Mengembangkan inovasi pelayanan yang telah dibangun seperti Sipintas dan Sispensu.

**Kepala Biro Umum,**



**Ir. Edi Dharma, M.Si.  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19680513 199403 1 014**

## LAMPIRAN 1

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

## SKPD : BIRO UMUM

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	
1	2	3	
1.	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH IKM Pelayanan Pimpinan IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
2.	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
3.	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.810.215.598	
	<b>Jumlah</b>	<b>124.810.215.598</b>	

SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BIRO UMUM,

dto,

dto,

**Drs. HANSASTRI, MM****SYEFDINON, S.Sos. M.M**

NIP. 19720713 199803 1 002

## LAMPIRAN 2

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**SKPD** : BIRO UMUM  
**TAHUN ANGGARAN** : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Stakeholders di Bidang Pelayanan Tamu dan Pimpinan	IKM Pelayanan Tamu Rumah Tangga KDH/WKDH	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (91,52)	103,18%	
		IKM Pelayanan Pimpinan	Sangat Baik (88,70)	Sangat Baik (90,14)	101,62%	
		IKM Pelayanan Administrasi Keuangan Setda	Sangat Baik (88,00)	Sangat Baik (89,75)	101,18%	
2	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,85)	BB (73,19)	103,30%	
3	Meningkatnya Pencapaian Target Retribusi	% Realisasi Penerimaan Retribusi	95%	70,00%	73,68%	

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.810.215.598	122.906.839.705	98,47
	<b>Jumlah</b>	<b>124.810.215.598</b>	<b>122.906.839.705</b>	<b>98,47</b>

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

dto

**NOLLY EKA MARDIANTO, SE. M.Si**  
NIP. 19790309 200902 1 001



**BIRO UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**